

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Todaro (2003) menjelaskan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut dan menciptakan lapangan kerja baru (Arsyad, 1999). Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Tarigan, 2005).

Tambunan (1996) memberi tahapan dalam pembangunan ekonomi regional yaitu:

1. Mempelajari terlebih dahulu karakteristik daerah yang akan dibangun, misalnya jumlah jenis serta kondisi-kondisi sumber daya alam yang ada dan

keadaan pasar, sosial, ekonomi makro (tingkat pendapatan) dan struktur politiknya.

2. Menentukan komoditas atau sektor unggulan dan jenis kegiatan ekonomi lainnya yang perlu dikembangkan, baik yang sudah ada sejak lama maupun yang belum ada.
3. Menentukan sifat serta mekanisme keterkaitan antar sektor yang ada di daerah tersebut serta mempelajari kelembagaan sosial masyarakat.

2.1.2. Teori Pusat Pertumbuhan

Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Poles Theory*) adalah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi. Teori ini merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Selain itu teori ini juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu.

Daerah (*region*) yang terdapat penduduk atau kegiatan yang terkonsentrasi pada suatu tempat terdapat berbagai istilah seperti: kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat pemukiman, dan daerah modal. Sebaliknya, daerah di luar pusat konsentrasi dinamakan : daerah pedalaman (*hinterland*), wilayah belakang, daerah pertanian, atau daerah pedesaan.

Keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya aglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) dan aglomeration (*economic of localization*). *Economic of scale* merupakan suatu keuntungan karena dalam memproduksi sudah berdasarkan spesialisasi, sehingga produksi menjadi lebih besar

dan biaya per unitnya menjadi lebih efisien. *Economic of agglomeration* merupakan suatu keuntungan karena di tempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan seperti jasa perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat-tempat pelatihan keterampilan, media untuk mengiklankan produk, dan lain sebagainya (Tarigan, 2006).

Hubungan antara kota (daerah maju) dengan daerah lain yang lebih terbelakang dapat dibedakan sebagai berikut : (1) Generatif : hubungan yang saling menguntungkan atau saling mengembangkan antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang ada di belakangnya; (2) Parasitif : hubungan yang terjadi di mana daerah kota (daerah yang lebih maju) tidak banyak membantu atau menolong daerah belakangnya, dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di daerah belakangnya; (3) *Enclave* (tertutup) : tidak terdapatnya hubungan antara daerah kota (daerah yang lebih maju) dengan daerah sekitarnya yang lebih terbelakang seakan-akan terpisah sama sekali.

Tarigan (2006) menyatakan bahwa pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu adanya hubungan antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya *multiplier effect* (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya.

2.1.3. Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Tarigan (2005) menjelaskan bahwa apabila dua negara saling berdagang dan masing-masing berkonsentrasi untuk mengekspor barang/jasa hasil produksi yang mempunyai keunggulan komparatif maka negara tersebut akan beruntung.

Keunggulan komparatif itu tidak hanya berlaku pada perdagangan internasional saja tetapi juga pada ekonomi regional.

Keunggulan komparatif komoditi suatu daerah atau negara adalah jika komoditi yang dihasilkannya lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan itu adalah nilai tambah maka dikatakan keunggulan absolut. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun dalam bentuk perbandingan lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibanding komoditi lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua negara atau daerah.

Keunggulan komparatif merupakan suatu metode untuk melihat kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Dalam mekanisme pasar daerah-daerah terdorong untuk memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif.

Menurut Salvatore (2007) keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara dimana biaya marjinal tenaga kerja negara tersebut lebih rendah dibandingkan dengan biaya marjinal tenaga kerja negara lain untuk menghasilkan produk yang sama. Hal ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja untuk semua produk dapat dihasilkan di negara tertentu. Konsep ini memiliki perbedaan dengan keunggulan absolut Adam Smith di mana keunggulan absolut lebih mengacu pada kemampuan tenaga kerja di suatu negara untuk menghasilkan barang tertentu dengan biaya marjinal absolut lebih rendah dari mitra dagangnya.

2.1.4. Agropolitan

Menurut Friedman dan Douglass (1976), pengembangan kawasan agropolitan adalah suatu model pengembangan pertanian yang berupaya mempercepat pembangunan perekonomian yang berbasis agrobisnis serta meningkatkan daya saing produk-produk pertanian yang dihasilkan pedesaan. Agropolitan terdiri dari dua kata agro dan polis, agro artinya pertanian dan polis artinya kota. Sehingga agropolitan diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah pertanian. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang seiring dengan bergerakinya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian wilayah sekitarnya (Suwandi, 2005 dalam Iqbal dan Iwan, 2009)

Soenarno (2003) mengatakan bahwa kawasan agropolitan merupakan sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hierarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya. Kawasan tersebut terkait dengan sistem pusat-pusat pemukiman nasional dan sistem pemukiman pada tingkat Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan RTRW Kabupaten. Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Konsep agropolitan berdasarkan Friedman dalam Martina (2004), terdiri dari distrik-distrik agropolitan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk 200 jiwa per km² dan di dalamnya terdapat kota-kota tani

dengan jumlah penduduk 10.000 – 25.000 jiwa. Sementara luas wilayah distrik adalah *commuting* berada pada radius 5 – 10 km, sehingga akan menghasilkan jumlah penduduk total antara 50.000–150.000 penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dengan tidak membedakan antara pertanian modern dan pertanian konvensional dan tiap-tiap distrik dianggap sebagai satuan tunggal yang terintegrasi.

Agropolitan mempunyai peranan sebagai pusat pertumbuhan dan berada pada kawasan agrobisnis atau sentra produksi pertanian. Kawasan Agropolitan menurut Rustiadi dan Pranoto (2007):

1) Memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan.

Komoditas dan produk olahan pertanian unggulan menjadi salah satu persyaratan penting. Beberapa contoh produk olahan tersebut, yaitu: Tanaman pangan (Jagung, Padi), hortikultura (Sayur-mayur, bunga, buah-buahan), perkebunan (Sawit, Kopi, Kakao), Perikanan darat/laut (Udang, berbagai jenis ikan) dan peternakan (Sapi, Babi).

2) Memiliki daya dukung dan potensi fisik yang baik.

Daya dukung lahan untuk pengembangan agropolitan harus sesuai dengan jenis komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Daya dukung ini meliputi: kemiringan lahan, ketinggian, kesuburan lahan dan kesesuaian lahan.

3) Luas Kawasan dan jumlah penduduk yang memadai.

Luas lahan yang memadai diperlukan untuk memperoleh hasil produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar secara keberlanjutan dalam mencapai skala

ekonomi dan cakupan ekonomi. Tersedianya dukungan, terminal, listrik dan lain sebagainya juga menjadi ciri kawasan agropolitan.

Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk :

- (1) Menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian di pedesaan,
- (2) Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis agrobisnis.
- (3) Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga ekonomi di pedesaan.
- (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- (5) Mewujudkan tata ruang ideal antara kota dengan desa yang saling mendukung melengkapi dan memperkuat (Pertanian, 2002).

Menurut Rivai (2003) pengembangan kawasan agropolitan menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan wilayah mengingat beberapa hal yakni:

- 1) Kawasan dan sektor yang dikembangkan sesuai dengan spesifik lokal.
- 2) Pengembangan kawasan agropolitan dapat meningkatkan pemerataan sektor yang dipilih merupakan basis aktifitas masyarakat.
- 3) Keberlanjutan dari pengembangan kawasan dan sektor menjadi lebih pasti mengingat sektor yang dipilih mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya.
- 4) Dalam penetapan pusat agropolitan terkait dengan sistem pusat-pusat nasional, provinsi dan kabupaten (RTRW Provinsi/Kabupaten) sehingga dapat menciptakan pengembangan wilayah yang serasi dan seimbang.

Rusastra *et. al.* (2002) menyatakan bahwa terdapat syarat kunci untuk pengembangan Agropolitan, yakni:

- (1) Produksi dengan bobot sektor pertanian
- (2) Prinsip ketergantungan dengan aktivitas pertanian dan neuro-systemnya
- (3) Prinsip pengaturan kelembagaan
- (4) Prinsip seimbang dinamis.

Keempat syarat kunci tersebut bersifat mutlak dan harus dikembangkan secara simultan dalam aplikasi pengembangan agropolitan.

Soenarno (2003) menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, perlu disusun *Master Plan* Pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Adapun muatan yang terkandung didalamnya adalah:

1. Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai:

- a. Pusat perdagangan dan transportasi pertanian (*agricultural trade/transport center*).
- b. Penyedia jasa pendukung pertanian (*agricultural support services*).
- c. Pasar konsumen produk non-pertanian (*non agricultural consumers market*).
- d. Pusat industri pertanian (*agro-based industry*).
- e. Penyedia pekerjaan non pertanian (*non-agricultural employment*).
- f. Pusat agropolitan dan *hinterlandnya* terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi, dan kabupaten (RTRW Provinsi/ Kabupaten).

2. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai:

- a. Pusat produksi pertanian (*agricultural production*).
- b. Intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*).
- c. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand for non-agricultural goods and services*).
- d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (*cash crop production and agricultural diversification*).

3. Penetapan sektor unggulan:

- a. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
- b. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).
- c. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.

4. Dukungan sistem infrastruktur

Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya : jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).

5. Dukungan sistem kelembagaan.

- a. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan fasilitasi Pemerintah Pusat.

- b. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan.

Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan perdesaan berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan.

2.2. Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Nayantakaningtyas dan Daryanto (2012) adalah tentang daya saing dan strategi pengembangan minyak sawit di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode *SWOT*.

Hasil penelitian Nayantakaningtyas dan Daryanto (2012) menunjukkan bahwa kekuatan (*Strength*) Industri Minyak Kelapa Sawit Nasional adalah minyak sawit memiliki keunggulan teknis dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, produksi *CPO* yang telah berstandar nasional dan internasional. Sedangkan kelemahan (*Weakness*) adalah Ekspor berupa produk hulu yang nilainya rendah, terbatasnya tenaga ahli dalam industri *CPO*, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai untuk menunjang produksi dan distribusi minyak sawit. Peluang (*Opportunity*) yang dapat diambil oleh industri tersebut adalah adanya insentif dari Pemerintah bagi pelaku industri hilir *CPO*, semakin berkembangnya tren produk berbasis minyak sawit baik pangan maupun nonpangan, perundang-undangan, peraturan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung *CPO* dan industri turunannya, adanya kontribusi penelitian dari lembaga riset PPKS (Pusat Penelitian

Kelapa Sawit), MAKSI (Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia), dan APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia). Sedangkan ancamannya (*Threat*) pada industri adalah isu negatif (*black campaign*) terhadap produk CPO Indonesia akibat dari pembukaan lahan yang menyebabkan global warming, adanya pesaing yang kuat yaitu Malaysia, Kompetisi dengan produsen minyak nabati lainnya, Lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemangku kepentingan . Stabilitas politik, keamanan dan pemerintahan nasional dan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Robbani dkk. (2015) melakukan studi mengenai sistem implementasi pengembangan industri hilir kelapa sawit di Indonesia. Metode yang dipakai adalah menggunakan penelitian terdahulu, wawancara mendalam dan kuesioner dari ahli atau praktisi dan dianalisis menggunakan Analisis Proses Jaringan (ANP).

Hasil penelitian Robbani dkk. (2015) menunjukkan bahwa kekuatan (*Strength*) pada industri hilir kelapa sawit yaitu memiliki ketersediaan bahan baku CPO yang memadai, terdapat kebijakan yang mendukung pengembangan industri hilir kelapa sawit (pusat dan daerah), memiliki calon investor yang berminat terhadap pengembangan industri hilir kelapa sawit, memiliki Dewan Masyarakat Sawit Indonesia (DMSI) sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan industri kelapa sawit. Sedangkan kelemahannya (*Weakness*) adalah ketersediaan dan proses pembangunan infrastruktur umum yang terbatas, ketergantungan teknologi dan SDM dari luar negeri, keterbatasan inovasi, lisensi dan paten produk olahan kelapa sawit, kebijakan fiskal (pajak dan APBN) dan investasi tidak menumbuhkan semangat investasi, ketersediaan infrastruktur konektivitas antar

wilayah yang kurang memadai dan berbiaya tinggi . Peluang (*Opportunity*) yang ada yaitu permintaan pasar interasional dan domestik terhadap produk olahan sawit yang terus meningkat, ketersediaan lahan dan posisi strategis Indonesia sebagai wilayah lalu lintas perdagangan internasional, era perdagangan bebas di berbagai komunitas internasional. Sedangkan ancamannya (*Threat*) adalah dinamika pasar minyak nabati yang ingin mengurangi konsumsi minyak sawit, kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit secara umum, perkembangan dan kemajuan teknologi pengolahan negara produsen *CPO* lainnya, kebijakan ekspor-impor negara potensial konsumen minyak kelapa sawit.

Selanjutnya Khairizky (2019) melakukan penelitian mengenai manajemen strategi peningkatan hasil perkebunan kelapa sawit rakyat oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Riau. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan analisis *SWOT* yakni dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Hasil penelitian Khairizky (2019) menunjukkan bahwa kekuatan (*Strength*) yang dimiliki Distanbun Provinsi Riau adalah adanya visi dan misi yang sudah ditetapkan sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan, struktur organisasi mempermudah pengorganisasian atau kelembagaan, adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Sedangkan kelemahannya (*Weakness*) yaitu perkebunan kelapa sawit rakyat tidak memiliki bagian struktur tersendiri di Distanbun, masih sedikitnya tenaga penyuluh perkebunan, perlunya peningkatan kemampuan manajerial, teknis dan penerapan teknologi tepat guna. Peluang (*Opportunity*) yang dapat dicapai oleh Distanbun Riau yaitu adanya mitra kerja di tingkat pusat maupun

pemerintah provinsi serta instansi terkait, adanya bantuan peremajaan dari berbagai sektor, penumbuhan lembaga petani-pekebun. Sedangkan ancamannya (*Threat*) adalah SDM Petani kelapa sawit rakyat masih rendah, Berkurangnya lahan pertanian produktif dan berganti menjadi lahan Tanaman Tua Rusak, teknologi produksi yang diterapkan masih relatif sederhana, petani swadaya tradisional adalah masih bersifat sporadik dan belum terorganisir.

